



RENCANA KERJA

KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN GRESIK
TAHUN 2026



tambak@gresikkab.go.id



@kecamatan_tambak

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran yang telah direncanakan didalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029. dan penyusunannya berpedoman pada Rancangan Renstra Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 - 2029 serta Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2026 sesuai dengan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawab Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Renja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026 memuat tujuan, sasaran, kebijakan, uraian program dan kegiatan Tahun 2026, spektrum pembiayaan, sebagai alat untuk mengimplementasikan pelaksanaan program meliputi pendanaannya yang terkait dengan APBD Kabupaten Gresik melalui RKA dan DPA.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rencana Kerja Kecamatan Tambak tersebut merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis. Proses penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tambak didasarkan pada penjaringan aspirasi yang secara formal diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan sebagaimana diamanatkan pada Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan instruksi

Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Rencana Kerja Kecamatan Tambak yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan prioritas pembangunan yang direncanakan pada tahun 2026 dengan maksud untuk memberikan landasan dan pedoman bagi semua pelaku pembangunan dalam melaksanakan tugas sebagai manifestasi kegiatan pembangunan di Kecamatan Tambak. Dengan demikian dokumen ini akan bermanfaat bagi Kecamatan dalam rangka untuk mewujudkan keterpaduan dan mensinergikan serta mewujudkan tujuan Kecamatan Tambak, pembiayaan pembangunan dari berbagai sumber misalnya APBD dan swadaya masyarakat, oleh karena itu program-program pembangunan yang akan direncanakan harus tertuang dalam Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026.

1.2. Landasan Hukum

Adapun ketentuan peraturan perundangan sebagai landasan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tambak tahun 2026, antara lain meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tatacara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tatacara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tatacara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Perubahan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 75 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 70 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai bahan / masukan bagi penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026. Pembahasan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026

dilakukan melalui

Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya, RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2025 hasil Musrenbang tersebut sebagai bahan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) serta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gresik Tahun 2026.

Adapun tujuan penyusunan Renja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini adalah sebagai bahan penyusunan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026, sehingga terjadi konsistensi antara perencanaan dan penganggaran.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tambak
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB V. PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TAMBAK TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2025 Dan Capaian Renstra Kecamatan Tambak

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025 dijadikan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025. Program dan kegiatan yang direncanakan dalam Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026, dilaksanakan seperti yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan diperbarui dengan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025.

Berdasarkan pelaksanaan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025, dilaksanakan sebanyak 4 program dan 9 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Tahun 2025, berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025, dilaksanakan sebanyak 4 program dan 9 kegiatan serta 24 Sub Kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2025 dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada Tabel 2.1. Capaian kinerja tahun 2024 dan prakiraan capaian kinerja tahun 2025 tersebut, dijadikan acuan untuk menentukan target kinerja program dan kegiatan pada tahun 2025, agar target capaian indikator sampai dengan tahun terakhir Rencana Strategis (tahun 2026) dapat tercapai.

Tabel 2.1 (T-C. 29)										
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH s/d TAHUN 2024										
KECAMATAN TAMBAK										
No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah & Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun (n-3) / 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024			Target Program dan Kegiatan Renja PD Tahun (n-1) 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun 2025	
					Target Renja PD Tahun (n-2) 2024	Realisasi Renja PD Tahun (n-2) 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun (n-1) 2025	Tingkat Capaian Relaisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Ketercapaian Sasaran Program OPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi	100%	13 dokumen / laporan	13 dokumen / laporan	13 dokumen / laporan	100	13 dokumen / laporan	13 dokumen / laporan	100
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku rencana kerja SKPD	8 buku	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	14 buku	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD	14 buku	1 dokumen			100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	21 buku	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dok.	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	100	1 dokumen	1 dokumen	100
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	58 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Adminmistrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan	24 orang	24 orang	24 orang	24 orang	100	24 orang	24 orang	100
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun	5 buku	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumber Daya Aparatur di Kecamatan	156 orang	31 orang	31 orang	35 orang	100	32 orang	32 orang	100
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	156 orang	31 orang	31 orang	35 orang	100	32 orang	32 orang	100
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah belanja Komponen Listrik	58 buah	1 paket	1 paket	1 paket	100	1 paket	1 paket	100
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang teredia	140 jenis	8 paket	8 paket	8 paket	100	8 paket	8 paket	100
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah kegiatan kantor yg disediakan makan dan minum	112 kegiatan	19 paket	19 paket	19 paket	100	19 paket	19 paket	100
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan	20 jenis	4 paket	4 paket	4 paket	100	4 paket	4 paket	100
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan	50 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	100	12 dokumen	12 dokumen	100
7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Materai/Buku cek	300 lembar		1 Paket			1 Paket	1 Paket	100

7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi	Jumlah pelaksanaan rapat koord. & konsultasi	72 bulan	12 laporan	12 lap.	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				5 dok.	5 dok.	100	5 dokumen	5 dokumen	100
7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah	30 jenis	7 jenis						
7.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah belanja pengadaan mebel kantor	5 jenis	2 unit						
7.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	10 jenis	5 unit						
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah jasa operasional Rek. Telp dan Listrik	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	72 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah fasilitasi Pemeliharaan terhadap sarana prasarana aparatur	100%	6 unit	6 unit	6 unit	100	6 unit	6 unit	100
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & mesin yg dilaksanakan	48 bulan	6 unit	6 unit	6 unit	100	5 Unit	6 unit	100
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor & bangunan lainnya	18 unit	3 unit	3 unit	3 unit	100	3 unit	3 unit	100
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana prasarana pendukung gedung kantor	120 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100	15 unit	15 unit	100

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	147 orang	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat	Jumlah peserta sosialisasi Administrasi Kependudukan	147 orang	1 laporan	1 laporan	1 laporan	100	1 laporan	1 laporan	100
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
		Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100%	60%	83%	83%	100%	93%	93%	100
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100%	75%	85%	85%	100%	95%	95%	100
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100%	65%	85%	85%	100%	93%	93%	100
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100%							
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100%							
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100%							

		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100%							
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Desa	100%	100%	100%	100%	100	28 Keg	100%	100
		Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di Musrenbang Kecamatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
		Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil Musrenbang Desa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musrenbang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yg berpartisipasi dalam forum Musrenbang	200 orang	7 lembaga	7 lembaga	7 lembaga	100	7 lembaga	7 lembaga	100
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21 buku	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100	21 dokumen	21 dokumen	100
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	45 kegiatan	23 laporan	23 laporan	23 laporan	100	23 laporan	23 laporan	100
7.01.04.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
		Persentase jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak			76%	76%	100	81%	81%	100

		Jumlah desa yang memiliki RBRA			71%	71%	100	76%	76%	100
		Jumlah desa yang memiliki Pusat Kreatifitas anak			71%	71%	100	76%	76%	100
		Jumlah desa yang memiliki Rumah Curhat aktif			76%	76%	100	81%	81%	100
		Jumlah desa yang memiliki regulasi stop perkawinan anak			81%	81%	100	86%	86%	100
		Jumlah desa yang memiliki regulasi terkait pencegahan anak putus sekolah			81%	81%	100	86%	86%	100
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	10 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	5 lembaga	100	5 lembaga	5 lembaga	100
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	12 bulan	100
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI dan Instansi Vertikal di Kec. Tambak	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	150 orang	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	28 orang	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100	12 laporan	12 laporan	100

7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Pelanggaran yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi / Sinergi dengan Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	24 kali	8 laporan	8 laporan	8 laporan	100	8 laporan	8 laporan	100
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penugasan Kepala Daerah yang difasilitasi	100%							
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Kewenangan/Penugasan yang dilimpahkan	100%							
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional dan Nasional	Jumlah Peserta Pembinaan	480 peserta							
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	100%	21 desa	21 desa	21 desa	100	100%	100%	100
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa & Peraturan Kepala Desa	Jumlah Laporan Peraturan Desa	126 buku	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100	21 dokumen	21 dokumen	100

7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang dibina	126 desa	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100	21 dokumen	21 dokumen	100
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi pengelolaan keuangan desa	126 desa	21 dokumen	21 dokumen	21 dokumen	100	21 dokumen	21 dokumen	100
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah peserta pelatihan manajemen pemerintahan desa	276 orang	4 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	100	4 dokumen	4 dokumen	100

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

Kantor Kecamatan Tambak mempunyai tugas membantu Pemerintah Kabupaten Gresik dalam penyelenggaraan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang meliputi pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa, dan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa.

Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terutama dalam administrasi kependudukan antara lain KTP, KK dan Surat Pindah. Selain itu permintaan surat rekomendasi dan koordinasi dan fasilitasi kegiatan pemerintahan lainnya.

Kinerja Pelayanan Kantor Kecamatan Tambak tahun 2024 dapat diukur melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Untuk mengetahui SKM pelayanan pada Kantor Kecamatan Tambak, tahun 2024 sudah dilakukan survey, hasilnya mendapat skor 98.87 % atau dalam kategori BAIK dan sudah melampaui target.

Hasil memuaskan SKM tidak terlepas dari penerapan standar pelayanan publik di Kantor Kecamatan Tambak. Kinerja pelayanan didukung oleh system yang baik, petugas yang cakap, dan ditunjang sarana yang cukup. Pelayanan dapat selesai seperti standar waktu yang ditetapkan. Kecuali jika ada masalah diluar kendali, misal Pemadaman listrik dan komputer KK/KTP rusak.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Kecamatan Tambak s/d Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.2 sebagaimana berikut :

TABEL 2.2 (T-C. 30)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN KECAMATAN TAMBAK
KABUPATEN GRESIK

No.	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	11	12	13
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di tingkat Kecamatan			94,68	94,68	94,68	94,7	92,33	95,80	94,68	94,7	

2.3 Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Tambak selama 5 (lima) tahun yang lalu, mencermati tantangan dan peluang pelayanan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tambak, maka beberapa permasalahan berdasarkan tugas dan pelayanan yang berkembang dan harus dihadapi Kecamatan Tambak 5 (lima) tahun ke depan antara lain:

A. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam pelayanan publik maka langkah-langkah yang akan diambil :

1. Reformasi Birokrasi atau Penataan Sumber Daya Manusia

Dalam rangka pelayanan yang prima langkah strategis yang ditetapkan Kecamatan Tambak adalah :

 - a. Menyiapkan petugas pelayanan yang trampil
 - b. Memberikan kesempatan petugas pelayanan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan
 - c. Mendorong untuk bekerja yang profesional dengan memberikan penghargaan bagi petugas yang disiplin dan berprestasi serta memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan.
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Untuk menunjang pelayanan yang baik diperlukan sarana dan prasarana sebagai berikut :

 - a. Menyediakan tempat pelayanan yang mudah didapat oleh pelanggan dan yang representatif.

- b. Menyediakan papan informasi mengenai mekanisme atau tata cara dan prosedur pelayanan
 - c. Melengkapi perangkat dan peralatan yang canggih untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan
 - d. Menyediakan pengaduan masyarakat, melalui media elektronik (Email, Telepon, Sosial Media, Kotak Saran Survey Kepuasan Masyarakat pada aplikasi Sukma E-Jatim, Whatsapp)
 - e. Menyediakan AC dalam ruang pelayanan masyarakat.
- 3. Upaya – upaya lain yang diperlukan
 - a. Sosialisasi dan memberikan informasi kepada masyarakat setiap ada kegiatan dan pertemuan warga mengenai sistem pelayanan di Kecamatan Tambak
 - b. Memberikan informasi dan penekanan kepada Kepala Desa melalui konferensi untuk melakukan langkah – langkah strategis dalam pelayanan di Tingkat Desa
 - c. Menyederhanakan prosedur pelayanan dengan tetap mengedepankan aturan yang telah ditetapkan
 - d. Menanggapi setiap ada pengaduan masyarakat 1 kali 24 jam untuk segera diselesaikan
- B. Makin tingginya tuntutan masyarakat dalam kewilayahan dan pembangunan maka langkah – langkah yang akan diambil :
 - 1. Mendorong pemerintah desa dalam menjaring aspirasi masyarakat dalam rangka musyawarah pembangunan desa untuk melibatkan semua unsur masyarakat yang ada di desa
 - 2. Identifikasi terhadap infrastruktur yang ada untuk membandingkan dengan jumlah dan kebutuhan masyarakat yang diperlukan
 - 3. Bersama – sama masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk menentukan dan menetapkan program prioritas pembangunan
- C. Manajemen pemerintahan di desa sebagai supervisi pembangunan maka langkah – langkah yang akan diambil :
 - 1. Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah desa dengan upaya melakukan pembinaan dan pelatihan secara berkala dan berkelanjutan.
 - 2. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara rutin dan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten

3. Menindaklanjuti dan memperbaiki segala bentuk temuan oleh Inspektorat Kabupaten
4. Memberikan penghargaan kepada desa yang berprestasi dalam upaya peningkatan manajemen pemerintah desa

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan Awal Renja Kecamatan Tambak disusun dari hasil Musrenbang Kecamatan dengan mengacu pada evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan dokumen pelaksanaan Renstra Kecamatan Tambak tahun 2021-2026. Review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3 (T-C.31) berikut:

Tabel 2.3 (Tabel T-C.31)											
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026											
Kecamatan Tambak											
No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian 2026	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					5,111,856,788					5,166,704,000	
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Kec. Tambak	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	4,760,504,988	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Kec. Tambak	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	4,838,971,834	
1	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	100%	8,999,000	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	4 dokumen	10,000,000	
1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah buku rencana kerja SKPD	1 dokumen	1,799,800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah buku rencana kerja SKPD	1 dokumen	2,000,000	
1.2	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1,799,800	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	2,000,000	
1.3	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1,799,800	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	2,000,000	
1.4	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,799,800	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	2,000,000	
1.5	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		Jumlah tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	12 laporan	1,799,800	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		Jumlah tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	12 laporan	2,000,000	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Adminmistrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	4,280,015,494	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Adminmistrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	4,280,216,502	
2.1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan	24 orang	4,278,215,694	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan	24 orang	4,278,216,502	
2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1,799,800	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	2,000,000	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	25 orang	5,917,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	25 orang	5,950,000	
3.1	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	25 orang	5,917,000	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	25 orang	5,950,000	
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	89,343,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	126,790,000	
4.1	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah belanja Komponen Listrik	1 paket	5,124,900	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah belanja Komponen Listrik	1 paket	5,150,000	
4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	27,223,000	Penyediaan Peralatan & Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	22,730,000	

4.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	3,353,500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	3,370,000	
4.4	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	4,121,100	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	5,980,000	
4.5	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dok.	2,198,400	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dok.	1,860,000	
4.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap.	11,997,600	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi & Konsultasi		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 lap.	62,400,000	
4.8	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem PBE pada SKPD	1 dok.	35,325,000	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD		Jumlah dokumen dukungan pelaksanaan sistem PBE pada SKPD	1 dok.	25,300,000	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		- Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	326,400,426	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		- Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	343,965,332	
			- Presentase petugas layanan yang memahami bahasa isyarat	100%				- Presentase petugas layanan yang memahami bahasa isyarat	100%		

6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	40,843,926	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	46,308,832	
6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	285,556,500	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	297,656,500	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah fasilitas pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	12 bulan	49,829,568	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah fasilitas pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	12 bulan	72,050,000	
			- Ketersediaan parkir kendaraan penyandang disabilitas					- Ketersediaan parkir kendaraan penyandang disabilitas			
7.1	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	31,291,200	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5 Unit	36,000,000	
7.2	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	13,868,368	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	31,300,000	
7.3	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	4,670,000	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 unit	4,750,000	

II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK		Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	3,195,300	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK		Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	3,211,677	
8	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yg tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90	3,195,300	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yg tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90	3,211,677	
8.1	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec. Tambak		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap.	3,195,300	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec. Tambak		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap.	3,211,677	
III	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN		Persentase RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu	100%	206,895,700	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN		Persentase RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu	100%	171,725,044	
			Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%				Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%		
			Persentase lembaga kemasyarakata n tingkat kecamatan yang dibina	100%				Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	100%		
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100%				Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	100%		

			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100%				Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	100%		
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100%				Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan	100%		
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100%				Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur	100%		
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100%				Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa	100%		
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100%				Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak	100%		

9	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	28 Keg	86,895,700	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	28 Keg	90,806,000	
			Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di Musrenbang Kecamatan	100%				Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di Musrenbang Kecamatan	100%		
			Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil Musrenbang Desa	100%				Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil Musrenbang Desa	100%		
9.1	Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	53,536,400	Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	7 lembaga	56,510,900	
9.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21 Dok.	14,433,700	Singkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah buku RKPDes	21 Dok.	15,795,100	

9.3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Lap.	18,925,600	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Pembinaan Kopwan, Bumdes	3 Lap.	18,500,000	
10	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	120,000,000	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	80,919,044	
			Persentase jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak	100%				Persentase jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak	100%		
			Jumlah desa yang memiliki RBRA	21 desa				Jumlah desa yang memiliki RBRA	21 desa		
			Jumlah desa yang memiliki Pusat Kreatifitas anak	21 desa				Jumlah desa yang memiliki Pusat Kreatifitas anak	21 desa		
			Jumlah desa yang memiliki Rumah Curhat aktif	21 desa				Jumlah desa yang memiliki Rumah Curhat aktif	21 desa		
			Jumlah desa yang memiliki regulasi stop perkawinan anak	21 desa				Jumlah desa yang memiliki regulasi stop perkawinan anak	21 desa		
			Jumlah desa yang memiliki regulasi terkait pencegahan anak putus sekolah	21 desa				Jumlah desa yang memiliki regulasi terkait pencegahan anak putus sekolah	21 desa		

10.1	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	5 lembaga	120,000,000	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diselenggarakan	5 lembaga	80,919,044	
IV	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	78,174,600	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	83,906,675	
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	12 bulan	68,121,600	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	12 bulan	68,443,000	
11.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	48,780,000	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	49,093,000	
11.2	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	19,341,600	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	19,350,000	

12	Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah		Prosentase Pelanggaran yang tertangani	100%	10,053,000	Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah		Prosentase Pelanggaran yang tertangani	100%	15,463,675	
12.1	Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 laporan	10,053,000	Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 laporan	15,463,675	
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	63,086,200	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	68,888,770	
14	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraa n Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21 desa	63,086,200	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraa n Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21 desa	68,888,770	

14.1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 Dokumen	2,610,000	Fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 Dokumen	4,342,000	
14.2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	23,890,500	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	24,012,000	
14.3	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	3,060,000	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa & Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	3,075,000	
14.4	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dokumen	28,317,200	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa & Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dokumen	34,383,300	

	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	5,208,500	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	3,076,470	
--	--	--	---	-----------	-----------	--	--	---	-----------	-----------	--

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan partisipatoris, maka renja Kecamatan Tambak juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut adalah dengan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria kemudian memilah dan memilih usulan berdasar kriteria dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari Musrenbang tahun lalu selanjutnya dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menanganinya.

Tabel 2.4 (Tabel T-C.32)
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kabupaten Gresik
Kecamatan
Tambak

Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Nasional berlandaskan pada RPJMN Keempat (2025-2026) yaitu terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa berdasarkan hukum serta birokrasi yang profesional dan netral. Sasaran tersebut didukung oleh ASN profesional, berintegritas, dan netral, pola hubungan kerja antar unit organisasi pemerintah, antara pemerintah dan masyarakat yang kolaboratif dan inklusif, organisasi birokrasi yang responsif dan adaptif, serta pelayanan publik yang berorientasi perbaikan sosial ekonomi berkelanjutan.

Kecamatan sebagai prioritas lokasi dalam Arah Kebijakan, Agenda Dan Prioritas Pada Tahun 2025-2029 RPJMD Kabupaten Gresik mengemban misi Bupati terpilih sesuai dengan prioritas Pembangunan Kabupaten Gresik yaitu **Misi Pertama : Memperkuat Insan Gresik Yang Unggul dan Sehat, Cerdas, Berkarakter, dan Berakhlakul Karimah. Dan Misi Ketiga : Menyelesaikan Pembangunan Infrastruktur yang Berkelanjutan serta Terintegrasi untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat.**

Adapun agenda yang harus dilaksanakan di tingkat kecamatan antara lain: Pengawasan Aparatur, Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pengembangan kerjasama antar daerah dan lembaga, peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, penyelenggaraan administrasi yang tertib dan baik, evaluasi dan pengawasan kelembagaan daerah dan pengembangan kelembagaan kerjasama antar daerah dan diklat aparatur daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Penetapan tujuan dan sasaran berdasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik.

Dengan menitik beratkan pada Misi maka tujuan Rencana Kerja yang telah ditetapkan sama seperti pada Rencana Strategis untuk Kecamatan Tambak tahun 2025– 2029 adalah **Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan yang berkualitas.**

Sedangka Sasaran Renja sama dengan Sasaran yang ada di Renstra yaitu **Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang baik dan Meningkatnya keselarasan pembangunan prioritas daerah ditingkat desa/kelurahan.**

3.3. Program dan Kegiatan

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mulai perencanaan Rencana Kerja tahun anggaran 2025 Pemerintah Kabupaten Gresik mempergunakan SIPD atau Sistem Informasi Perencanaan Daerah dengan tujuan untuk mempermudah proses penyusunan perencanaan-penganggaran pembangunan daerah, memperkecil kemungkinan kesalahan perencanaan-penganggaran dan mempermudah pemantauan dan evaluasi proses perencanaan-penganggaran mulai dari Kepala Daerah hingga aparatur pemerintah daerah secara keseluruhan.

Di Tahun 2026 Kecamatan Tambak merencanakan melaksanakan 5 program yang dijabarkan dalam 13 kegiatan 33 Sub Kegiatan. Penyebaran lokasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan sasaran program dan kegiatan yang dimaksud. Untuk kegiatan-kegiatan rutin, dialokasikan pada kantor Kecamatan Tambak, sedangkan kegiatan-kegiatan yang diarahkan untuk pencapaian target kinerja Kecamatan Tambak disesuaikan dengan sasaran target kinerja yang sudah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029. Penjabaran program dan kegiatan Kecamatan

Tambak Tahun 2026 serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1																
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH																
KECAMATAN TAMBAK TAHUN 2026																
NO.	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	UNSUR KEWILAYAHAN														
	7.01	KECAMATAN						5,111,856,788							5,319,936,000	
I	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	100%	100%	100%	4,760,504,988	Kec. Tambak		-	Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, efektif dan anti korupsi		100%	4,982,484,064	Kec. Tambak
1	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi	13 Dok.	13 dokumen / laporan	13 Dok.	13 Dok.	8,999,000					Seluruh Pegawai di Lingkungan Kec. Tambak	4 dok.	11,250,000	
1.1	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah buku rencana kerja SKPD	2 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1,799,800		PAD		Penguatan Reformasi Birokrasi		1 Dok.	2,250,000	
1.2	7.01.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1,799,800		PAD		didukung pelayanan publik		1 Dok.	2,250,000	
1.3	7.01.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1,799,800		PAD		inklusif dan responsif gender serta		1 Dok.	2,250,000	
1.4	7.01.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1 Dok.	1,799,800		PAD		pengembangan Smart Governance		1 Dok.	2,250,000	
1.5	7.01.01.2.01.0006	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Jumlah tersusnya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	1,799,800		PAD				12 Lap.	2,250,000	

2	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Adminmistrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	4,280,015,494					Seluruh Pegawai di Lingkungan Kec. Tambak	12 bulan	4,323,248,316	
2.1	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan	24 org / bln	25 orang	25 orang	25 orang	4,278,215,694		DAU				24 orang/ Bln	4,320,998,316.44	
2.2	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1,799,800		PAD				1 Lap.	2,250,000	
2.3	7.01.01.2.02.0006	Koordinasi dan penyusunan laporan Keuangan Bulanan, Triwulan, Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	18 Lap.	-	-	-	-		PAD				-	-	
3	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	31 orang	32 orang	25 orang	25 orang	5,917,000					Karyawan/ Karyawati Kec. Tambak	31 orang	6,118,700	
3.1	7.01.01.2.05.0009	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	31 orang	32 orang	25 orang	25 orang	5,917,000		PAD				31 Orang	6,118,700	
4	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah fasilitasi terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	89,343,500					Karyawan/ Karyawati Kec. Tambak	12 bulan	152,936,300	
4.1	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	1 paket	5,124,900		PAD				1 Paket	5,299,399.74	

4.2	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	6 paket	6 paket	27,223,000		PAD				8 Paket	23,388,500	
4.3	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	19 paket	19 paket	2 paket	2 paket	3,353,500		PAD				19 Paket	3,467,500	
4.4	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 paket	4 paket	3 paket	3 paket	4,121,100		PAD				4 Paket	6,155,900	
4.5	7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dok.	12 Dok.	5 Dok.	5 Dok.	2,198,400		PAD				12 Dok.	1,900,000	
4.6	7.01.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket				PAD						
4.7	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 lap.	12 lap.	12 lap.	12 lap.	11,997,600		PAD				12 lap.	64,300,000	
4.8	7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	-	5 dok.	1 dok.	1 dok.	35,325,000		PAD				5 dok.	48,425,000	
6	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	326,400,426					Karyawan/ Karyawati Kec. Tambak	24 laporan	356,025,648	
6.1	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	40,843,926		PAD				12 Lap.	49,795,647.82	

6.2	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	12 Lap.	285,556,500		PAD				12 Lap.	306,230,000.00	
7	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah fasilitas Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	49,829,568					Karyawan/ Karyawati Kec. Tambak	12 bulan	132,905,100	
			Ketersediaan parkir kendaraan penyandang disabilitas	1 unit												
7.1	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan & mesin yg dilaksanakan	6 unit	6 unit	5 Unit	5 Unit	31,291,200		PAD				6 Unit	43,816,300	
7.2	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	3 unit	3 unit	3 unit	3 unit	13,868,368		PAD				3 unit	84,259,800	
7.3	7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	20 unit	15 unit	7 unit	7 unit	4,670,000		PAD				20 unit	4,829,000	
II	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK	Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	4	4	4	3,195,300						4	3,306,927	
8	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yg tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84	88	90	90	3,195,300					Masyarakat umum Kec. Tambak	90	3,306,927	
8.1	7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec. Tambak	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	1 Lap.	3,195,300		PAD				1 Lap.	3,306,927	

7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN	Persentase RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu		100%	206,895,700			100%	171,725,044
		Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi		100%				100%	
		Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina		100%				100%	
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan		100%				100%	
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan		100%				100%	
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan		100%				100%	
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur		100%				100%	
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa		100%				100%	
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak		100%				100%	
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa		28 Keg	86,895,700			28 Keg	90,806,000

		Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di Musrenbang Kecamatan		100%				100%	
		Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil Musrenbang Desa		100%				100%	
7.01.03.2.01.0001	Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		7 lembaga	53,536,400	PAD		7 lembaga	56,510,900
7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		21 Dok.	14,433,700	PAD		21 Dok.	15,795,100
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		3 Lap.	18,925,600	PAD		3 Lap.	18,500,000
7.01.04.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyaraktan Tingkat Kecamatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina		100%	120,000,000			100%	80,919,044
		Persentase jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak		100%				100%	
		Jumlah desa yang memiliki RBRA		21 desa				21 desa	
		Jumlah desa yang memiliki Pusat Kreatifitas anak		21 desa				21 desa	

		Jumlah desa yang memiliki Rumah Curhat aktif		21 desa				21 desa	
		Jumlah desa yang memiliki regulasi stop perkawinan anak		21 desa				21 desa	
		Jumlah desa yang memiliki regulasi terkait pencegahan anak putus sekolah		21 desa				21 desa	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		5 lembaga	120,000,000	PAD		5 lembaga	80,919,044
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM	Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi		100%	78,174,600			100%	83,906,675
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum	Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum		12 bulan	68,121,600			12 bulan	68,443,000
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		12 laporan	48,780,000	PAD		12 laporan	49,093,000
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		4 laporan	19,341,600	PAD		4 laporan	19,350,000
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah	Prosentase Pelanggaran yang tertangani		100%	10,053,000			100%	15,463,675

7.01.04.2.02.0001	Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		8 laporan	10,053,000	PAD		8 laporan	15,463,675
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu		100%	63,086,200			21 desa	68,888,770
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		21 desa	63,086,200			21 desa	68,888,770
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		21 Dokumen	2,610,000	PAD		21 Dokumen	4,342,000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa		21 Dokumen	23,890,500	PAD		21 Dokumen	24,012,000
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		21 Dokumen	3,060,000	PAD		21 Dokumen	3,075,000
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		6 Dokumen	28,317,200	PAD		6 Dokumen	34,383,300

7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		1 Dokumen	5,208,500	PAD		1 Dokumen	3,076,470
-------------------	--	---	--	-----------	-----------	-----	--	-----------	-----------

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Perencanaan program dan kegiatan Kecamatan Tambak Tahun 2026 mengacu pada arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan disesuaikan dengan jumlah dana/ anggaran yang sudah ditetapkan pagu indikatifnya oleh Bappeda Kabupaten Gresik.

Rencana Kerja dan pendanaan Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026 seperti dalam tabel 4.1. sebagai berikut :

Tabel 4.1					
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026					
KECAMATAN TAMBAK					
Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	2		3	5	6
					5,111,856,788
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN	Kec. Tambak	Persentase ketercapaian sasaran program OPD	100%	4,760,504,988
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Perencanaan,Penganggaran dan Evaluasi	100%	8,999,000
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah buku rencana kerja SKPD	1 dokumen	1,799,800
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD		Jumlah Dokumen RKA	1 dokumen	1,799,800
7.01.01.2.01.0004	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD		Jumlah Dokumen DPA SKPD	1 dokumen	1,799,800
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 dokumen	1,799,800
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi & Penyusunan Laporan Capaian Kinerja & Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD		Jumlah tersusunya laporan kinerja dan ikhtisar realisasi	12 laporan	1,799,800
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Pelaporan Kinerja dan Adminmistrasi Keuangan Perangkat Daerah	12 bulan	4,280,015,494
7.01.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN		Jumlah ASN yg menerima gaji & tunjangan	24 orang	4,278,215,694

7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun		Jumlah Laporan/Buku Keuangan Akhir Tahun	1 laporan	1,799,800
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Peserta Pembinaan Administrasi Sumberdaya Aparatur di Kecamatan	25 orang	5,917,000
7.01.01.2.05.0009	Pendidikan & Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas & Fungsi		Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan	25 orang	5,917,000
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	12 bulan	89,343,500
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,124,900
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 paket	27,223,000
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 paket	3,353,500
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 paket	4,121,100
7.01.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang Undangan		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dok.	2,198,400
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah pelaksanaan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi	12 lap.	11,997,600
7.01.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem PBE pada SKPD		Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dok.	35,325,000
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Jumlah fasilitas terhadap pelaksanaan Tupoksi Perangkat Daerah	24 laporan	326,400,426
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik		Persentase jasa komunikasi, Rek. Telp dan Listrik	12 laporan	40,843,926
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Persentase jasa Pelayanan Umum kantor	12 laporan	285,556,500
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah fasilitas Pemeliharaan terhadap sarana prasarana Aparatur	12 bulan	49,829,568
			Ketersediaan parkir kendaraan penyandang disabilitas	1 unit	
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan & Mesin Lainnya		Jumlah pemeliharaan peralatan & mesin yg dilaksanakan	5 Unit	31,291,200
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor & Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan gedung kantor dan bangunan lainnya	3 unit	13,868,368
7.01.01.2.09.0011	Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	7 unit	4,670,000

7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN & PELAYANAN PUBLIK		Tingkat Kematangan Pelayanan Publik	4	3,195,300
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintah yg tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yg ada di Kecamatan		Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	90	3,195,300
7.01.02.2.02.0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kec. Tambak		Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1 Lap.	3,195,300
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA & KELURAHAN		Persentase RKPDesa yang ditetapkan tepat waktu	100%	206,895,700
			Persentase Lembaga Ekonomi Masyarakat yang difasilitasi	100%	
			Persentase lembaga kemasyarakatan tingkat kecamatan yang dibina	93%	
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan program prioritas bidang Pendidikan	95%	
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Kesehatan	93%	
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Pemberdayaan Perempuan		
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Infrastruktur		
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Penanggulangan Bencana oleh Desa		
			Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan Program Prioritas Bidang Perlindungan Anak		
7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah pelaksanaan koordinasi pemberdayaan desa	28 Keg	86,895,700
			Persentase perwakilan kelompok perempuan dan forum anak di Musrenbang Kecamatan	100%	
			Persentase desa yang memasukkan usulan perempuan dalam hasil Musrenbang Desa	100%	
7.01.03.2.01.0001	Penigkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	7 lembaga	53,536,400

7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	21 Dok.	14,433,700
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	3 Lap.	18,925,600
7.01.04.2.03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Persentase Lembaga Kemasyarakatan tingkat Kecamatan yang dibina	100%	120,000,000
			Persentase jumlah desa ramah perempuan dan peduli anak	76%	
			Jumlah desa yang memiliki RBRA	71%	
			Jumlah desa yang memiliki Pusat Kreatifitas anak	71%	
			Jumlah desa yang memiliki Rumah Curhat aktif	76%	
			Jumlah desa yang memiliki regulasi stop perkawinan anak	81%	
			Jumlah desa yang memiliki regulasi terkait pencegahan anak putus sekolah	81%	
7.01.03.2.03.0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	5 lembaga	120,000,000
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN & KETERTIBAN UMUM		Persentase Penyelesaian Konflik di Kecamatan yang difasilitasi	100%	78,174,600
7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman & Ketertiban Umum		Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Trantibum	12 bulan	68,121,600
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara RI, TNI & Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 laporan	48,780,000
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4 laporan	19,341,600
7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan & Penegakan Peraturan Daerah & Peraturan Kepala Daerah		Prosentase Pelanggaran yang tertangani	100%	10,053,000
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi / Sinergi dgn Perangkat Daerah yg Tugas & Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan dan/atau Kepolisian Negara RI		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang- Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	8 laporan	10,053,000

7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		Persentase APBDes yang ditetapkan tepat waktu	100%	63,086,200
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah Desa yang difasilitasi penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21 desa	63,086,200
7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	21 Dokumen	2,610,000
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	21 Dokumen	23,890,500
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	21 Dokumen	3,060,000
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	6 Dokumen	28,317,200
7.01.06.2.01.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa		Jumlah Dokumen Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	1 Dokumen	5,208,500

--	--	--	--	--	--

BAB V

P E N U T U P

Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Rencana Kerja Kecamatan Tambak Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ini ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan Tahun 2026 sebagai penjabaran Rencana Strategis Kecamatan Tambak Tahun 2025 - 2029 selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Kecamatan Tambak tahun 2026.
2. Dengan ditetapkan Rencana Kerja Kecamatan tahun 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan untuk dijadikan pedoman dalam operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program kegiatan tahunan
3. Rencana Kerja Kecamatan Tambak tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Aparatur Kecamatan sekaligus sebagai dasar pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKjIP) Tahun 2025.
4. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tambak tahun 2026 ini dapat menjadi pedoman Aparatur Pemerintah Kecamatan di dalam melaksanakan program kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
5. Rencana Kerja Kecamatan Tambak Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif tahun 2025

dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi tahun 2025 ;

6. Diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tambak Tahun 2026 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat asas dalam perencanaan kinerja tahun 2026 dan dapat dihindari adanya RKA-SKPD yang keluar dari kesepakatan dalam Renja.



Tambak, 20 Oktober 2025

CAMAT TAMBAK

MUHAMMAD NURSYAMSI, S.P., M.M.A.

Pembina Tingkat I

NIP. 197011241999011001



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Berkelanjutan Pencapaian Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132)
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48);
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 66);
52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokumen Rencana Kerja :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 - i. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
 - o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
 - u. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
 - v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
 - x. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik;
 - y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - z. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
 - aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
 - bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
 - cc. Kecamatan Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas;
 - ee. Kecamatan Manyar;
 - ff. Kecamatan Cerme;
 - gg. Kecamatan Benjeng;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan;
 - jj. Kecamatan Driyorejo;
 - kk. Kecamatan Wringinanom;
 - ll. Kecamatan Kedamean;
 - mm. Kecamatan Menganti;
 - nn. Kecamatan Sidayu;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah;
 - pp. Kecamatan Panceng;
 - qq. Kecamatan Bungah;
 - rr. Kecamatan Dukun;
 - ss. Kecamatan Sangkapura; dan
 - tt. Kecamatan Tambak.
- (3) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 78